

Sinergi Pemerintah DPRD dan Masyarakat dalam Perekonomian

by Jurnal Multidisiplin Dehasen

Submission date: 18-Apr-2022 02:04AM (UTC-0700)

Submission ID: 1813377685

File name: 5._Ihsan_Rahmadi_Wijaya.doc (1.06M)

Word count: 1576

Character count: 11016

Sinergi Pemerintah DPRD dan Masyarakat dalam Perekonomian

Ihsan Rahmadi Wijaya ¹⁾; Muhammad Yafiz ²⁾

^{1,2)} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹⁾ ihsanrahmadi825@gmail.com; ²⁾ muhammadyafiz@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [9 Maret 2022]

Revised [5 April 2022]

Accepted [11 April 2022]

KEYWORDS

Synergy of Government,
DPRD, Economy

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dalam hal ini peran DPRD untuk memantau keuangan daerah sangat dibutuhkan, agar program yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah DPRD dalam perekonomian sangat signifikan dalam perekonomian.

ABSTRACT

The government as one of the economic actors (government households), has an important function in the economy, which is to function as stabilization, allocation, and distribution. In this case, the role of DPRD to monitor regional finances is very much needed, so that the programs that have been prepared can run effectively, efficiently and economically. The type of research used is qualitative research. The results of this study indicate that the role of the DPRD government in the economy is very significant in the economy.

PENDAHULUAN

Pada saat covid-19 menyebar perekonomian seluruh dunia sangat terpuak khususnya dalam negeri kita sendiri. Indonesia masih termasuk negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Pemerintah Indonesia sangat penting meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya dalam perekonomian sehingga dapat mencegah kemiskinan. Kreatifitas diri sangat diperlukan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, DPRD ikut andil dalam membangun perekonomian serta meningkatkan kemandirian masyarakat.

Sesuai Fungsi dari DPRD yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi maka dari itu faktor transparansi dan control publik terhadap fungsi DPRD menjadi penting dalam rangka menciptakan system pemerintahan dan perekonomian yang baik di daerah. Dalam ketiga fungsi DPRD tersebut anggota DPRD tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka akses publik terhadap pelaksanaannya, maka dari itu peran dari kedua belah pihak yaitu dari DPRD maupun masyarakat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan tentunya juga dalam perekonomian suatu daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergi antara pemerintah DPRD dan masyarakat dalam perekonomian sehingga mengungkapkan makna dan menginformasikan perilaku atau hasil yang diukur dengan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

LANDASAN TEORI

Sinergi

Merupakan suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimum. Hartanto (1996) :

Sinergi adalah suatu gagasan baru, yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan suatu gagasan baru, yang dilandasi oleh pola pikir atau konsep yang baru.

Covey (1989) : Sinergi lebih dari sekedar bekerjasama. Sinergi adalah menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama, oleh karena itu Covey menyatakan 'creative cooperation'.

Dalam hal itu, ada dua istilah yang didapat, yaitu sikap kerjasama dan sikap kreatif. Hal itu menjelaskan bahwa hubungan kerjasama tidak hanya untuk membangun kebersamaan, tapi juga untuk membangun interaksi yang dapat memicu daya pikir sehingga dapat membentuk kreativitas

secara kolektif. Didalam sebuah organisasi, sinergi hubungan interaktif antar anggota akan dapat saling memicu daya pikir, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah gagasan baru, yang berjalan melalui sebuah proses yang berkesinambungan sehingga dapat terjadi proses pengembangan pengetahuan dengan wawasan yang kualitasnya semakin tinggi.

Untuk meningkatkan perilaku sinergi menjadi berkualitas, Menurut Sulasmi (2003) dibedakan tiga dimensi perilaku sebagai berikut, yaitu:

- a. Perilaku Kerjasama diartikan sebagai sebuah perilaku anggota yang mengutamakan kebersamaan dalam menjalankan berbagai aktifitas kerja, dengan cara saling membantu, mendorong, dan berbagi informasi dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami secara bersama. Perilaku ini didukung oleh semangat kerjasama (co-operative spirit) yang tinggi dari para anggota kelompok
- b. Perilaku Belajar Inovatif yang diartikan sebagai perilaku anggota untuk selalu belajar dari pengalaman sebelumnya, mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan, dan tidak henti mencari gagasan-gagasan baru untuk memenuhi tantangan lingkungan.
- c. Intensitas Kerja merupakan keaktifan anggota yang sangat tinggi dan tuntas dalam menjalankan tugasnya. Intensitas kerja kelompok didukung oleh para anggotanya yang bermotivasi kerja yang tinggi (work spirit). Pengembangan konsep perilaku yang dinyatakan oleh Sulasmi dapat memicu preposisi bahwa: Perilaku kerjasama, perilaku belajar inovatif dan intensitas kerja secara bersama-sama dapat membangun kualitas sinergi.

Sinergi Pemerintah

Wakil Menteri Keuangan (wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan bahwa peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sangat sentral dalam membangun Indonesia. Sebagai lembaga legislative, DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan pembangunan.

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian.
5. Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010), pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi.

17 METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode ilmiah untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data. Penelitian ini Menurut Nasir di dalam buku Pendekatan Penelitian Kuantitatif metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. (Rukajat, 2018:1)

Berdasarkan pendapat Nasir jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistis, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Rukajat, 2018:1)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pembangunan ekonomi daerah dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah (endogenous development), dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal. Identifikasi sektor/subsektor ekonomi potensial menjadi kebutuhan bagi optimalisasi proses dan keberhasilan pembangunan ekonomi dimaksud. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menyampaikan bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat sentral dalam membangun Indonesia sentris. Sebagai lembaga legislatif, DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan pembangunan. Wamenkeu menegaskan bahwa peran anggota DPRD sangat penting dalam merangkul semua kalangan di daerah serta berkolaborasi dengan rakyat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah adalah data mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga yang berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Suatu masyarakat dipandang mengalami suatu pertumbuhan dalam kemakmuran masyarakat apabila pendapatan perkapita menurut harga tetap terus menerus bertambah. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merupakan gambaran dari aktifitas perekonomian masyarakat di suatu daerah, disamping juga dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi suatu daerah untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama sama mengambil inisiatif untuk pembangunan daerah termasuk juga perekonomiannya seperti yang telah dikatakan oleh wamenkeu Mardiasmo yang menegaskan bahwa peran anggota DPRD dalam merangkul semua kalangan di daerah serta berkolaborasi dengan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2008. Ekonomi Archipelago, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arsyad, L. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kedua. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. 2019. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Deli Serdang. https://dprd.banjarnegarakab.go.id/?page_id=109
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/wamenkeu-peran-dprd-sangat-sentral-untuk-pembangunan-indonesia/>
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penilaian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Yogyakarta:Deepublish/CV. Budi Utama

Sinergi Pemerintah DPRD dan Masyarakat dalam Perekonomian

ORIGINALITY REPORT

22%
SIMILARITY INDEX

15%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 topmerdeka.blogspot.com **3%**
Internet Source

2 pdfcoffee.com **2%**
Internet Source

3 tamtamfire113.blogspot.com **2%**
Internet Source

4 Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang **2%**
Student Paper

5 cindarapunya.blogspot.com **1%**
Internet Source

6 Submitted to Binus University International **1%**
Student Paper

7 ursaminorblog.blogspot.com **1%**
Internet Source

8 repository.unwira.ac.id **1%**
Internet Source

9	Epra ., Wenda, O. Esry H. Laoh, Melissa L. G. Tarore. "PERANAN SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2018 Publication	1 %
10	Arief Sumeru. "KEDUDUKAN PEJABAT KEPALA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016 Publication	1 %
11	Maranata Maranata, Erfit Erfit, Candra Mustika. "Analisis peranan dan daya saing sector pertanian serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muaro Jambi", e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah, 2019 Publication	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	1 %
13	celillesmana.blogspot.com Internet Source	1 %
14	journal.unesa.ac.id Internet Source	1 %
15	Ahmad Riyadh U.B., Hendra Sukmana. "MODEL REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK	1 %

DI KABUPATEN SIDOARJO", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2015

Publication

16

Sriyono Sriyono. "STRATEGI KEBIJAKAN MONETER DI INDONESIA", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2016

Publication

1 %

17

blognyawugu.blogspot.com

Internet Source

1 %

18

digilib.uns.ac.id

Internet Source

1 %

19

e-journal.stkipnutegal.ac.id

Internet Source

1 %

20

jurnal.stisipbp.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On